



Kabar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT2

Edisi Enam | Januari - April 2026

Penyelesaian
Konflik Kawasan
Hutan Konservasi
di Sulawesi Tengah

Rahimah,
Sang Perempuan Penggerak
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Konsultasi Publik
Rencana Aksi Daerah
Gas Rumah Kaca (GRK)

Pulihkan Lahan Kritis, Provinsi
Sulawesi Tengah Bagikan 400
Ribu Bibit Tanaman.

Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Sulawesi Tengah

Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan Konservasi di Sulawesi Tengah

SOSIALISASI
RENCANA IDENTIFIKASI KONFLIK TENURIAL SEBAGAI
DASAR PENYELESAIAN USAHA/KEGIATAN
TERBANGUN BERDASARKAN
PERMEN LHK NO 14 TAHUN 2023
Palu, 26 November 2025

Palu, Hotel Sutan Raja

Tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang menjadi salah satu tantangan tata kelola hutan konservasi di Sulawesi Tengah. Untuk mencegah konflik dan memperbaiki tata kelola hutannya, Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan identifikasi dan sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru.

Di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat di Kota Palu dan Kab Sigi, Edy Sitorus, Kepala Tahura, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Identifikasi dan sosialisasi untuk membangun pemahaman kita bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menempuh jalan tengah dalam penyelesaian konflik, sebagai bentuk mengakomodir hak masyarakat dan menegakan aturan berjalan bersamaan,” ujarnya.

Identifikasi melibatkan Satuan Tugas Penanganan Konflik Hutan (Satgas PKH) nasional, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan, Akademisi Universitas Tadulako, serta Walhi Sulawesi Tengah sebagai narasumber utama.

Kiki Rizki Amalia, Project Officer PMU KEMITRAAN, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari capaian utama proyek RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah yaitu perlindungan, penangan dan perbaikan tata kelola hutan.

“Kami berharap melalui sosialisasi, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023 tidak lagi dipandang sebagai ancaman penertiban, melainkan sebagai jembatan hukum yang memberikan jalan keluar bagi petani dan masyarakat yang sudah eksis di kawasan hutan,” ujarnya.

Sebagai alternatif solusi, Kiki menyebut masyarakat dapat mengajukan skema yang ditawarkan oleh negara.

“Masyarakat dapat memanfaatkan skema kemitraan konservasi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Permen ini, sehingga mereka mendapatkan kepastian legal untuk bertani, sementara fungsi konservasi Tahura tetap terjaga,” terangnya.

Tahura dan Satgas PKH akan menindaklanjuti hasil potensi tumpang tindih yang berhasil diidentifikasi. Misalnya dari 5.000 Ha wilayah adat Tompu dan Rangunau yang telah dimiliki secara turun temurun dan dimanfaatkan untuk tanaman padi ladang, sebanyak 519 Ha diduga tumpang tindih dengan pertambangan emas. Ada juga konflik batas antara wilayah kota Palu dan Kabupaten Sigi Topomoni yang saling klaim, ini berpotensi memicu konflik baru di dalam kawasan Tahura.



Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Sulawesi Tengah

Konflik tenurial menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah. Konflik ini meliputi tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, perizinan pertambangan, perkebunan dan illegal logging. Lewat program RBP GCF REDD+ KEMITRAAN bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng mengintensifkan kegiatan patroli sebagai langkah untuk identifikasi dan pencegahan.

Pada periode tahun 2025 hingga bulan April 2026 kegiatan patroli dilaksanakan di 67 desa dengan cakupan luas wilayah 2.067 Ha oleh 13 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura di 13 Kab/Kota. Terdapat delapan kasus yang kerap terjadi antara lain, perambahan hutan, pembagunan jalan di dalam kawasan hutan, bangunan didalam kawasan hutan, illegal loging, tambang emas, tambang galian c, tambang nikel dan perkebunan sawit.

Mengatasi kasus-kasus tersebut, KPH dan Tahura melakukan penyitaan barang bukti, penghentian aktivitas pertambangan dan rekomendasi usulan Perhutanan Sosial (PS) pada aktivitas perambahan hutan, sebagai solusi untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap pengelolaan dikawasan hutan. Berikut presentasi tindakan dan penyelesaian konflik yang telah dilakukan selama 2025 – 2026.





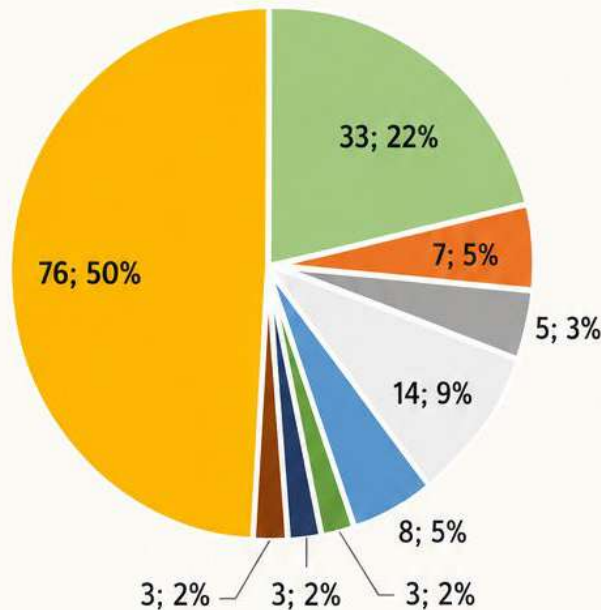
PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN UPAYA PENANGANANNYA



Data ini menunjukkan penyebab perubahan kawasan hutan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.



PENYEBAB PERUBAHAN KAWASAN HUTAN



Perambahan Hutan 33; 22%



Pembangunan jalan di kawasan hutan 7; 5%



Bagunan didalam kawasan hutan 5; 3%



Illegal Logging 14; 9%



Tambang emas 8; 5%



Tambang galian C 3; 2%



Kebakaran Hutan 3; 2%



Perluasan Lahan Pertanian 3; 2%



Perhutanan Sosial 76; 50%



UPAYA PENANGANAN DAN TINDAKAN



Perhutanan Sosial 10; 18%



Penyitaan barang bukti illegal logging dan pemanfaatan hutan 5; 9%



Penyitaan barang bukti alat berat 2; 3%



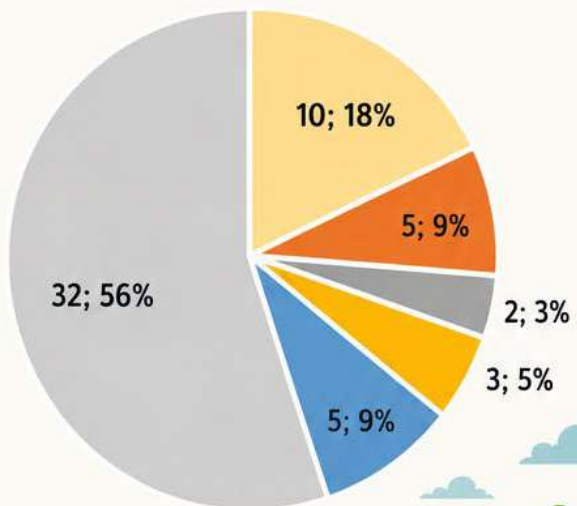
Penghentian aktivitas pertambangan ilegal 3; 5%



Rekomendasi perizinan kasus pertambangan 5; 9%



Sosialisasi dan pembinaan masyarakat 32; 56%



Melalui sinergi penegakan hukum, perizinan yang tepat, serta pemberdayaan masyarakat, kita dapat menjaga kelestarian hutan untuk masa depan yang lebih baik.



Selain itu, KPH dan Tahura juga melakukan kegiatan patroli dan melakukan seperti pembinaan masyarakat. Menurut Kepala KPH Banawa Lalundu, Mirwan Lamadura S.Hut MAP, kegiatan patroli sangat membantu pencegahan terhadap tindakan pengrusakan hutan di wilayahnya.

“Selama kegiatan patroli, kami berhasil mengamankan satu alat berat excavator di Desa Loli Oge yang beroperasi dikawasan hutan untuk pembukaan jalan, dan perambahan hutan di Desa Tinauka,” ujarnya.

Edy Wicaksono Program Manager RBP GCF REDD+ KEMITRAAN, patroli merupakan kegiatan penting dalam proyek ini, dalam mendukung KPH dan Tahura

mengurangi dan mencegah kerusakan hutan dari aktivitas ilegal di tingkat tapak ujarnya.

“Selama pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh 13 KPH dan Tahura, ada 10 kasus tumpang tindih lahan masyarakat akan difasilitasi perhutanan sosial agar masyarakat memiliki akses secara legal didalam kawasan hutan,” tambahnya.

Saat ini pelaksanaan patroli pada KPH dan Tahura terus dilaksanakan sepanjang periode program 2025 - 2026. Masing – masing KPH dan Tahura telah melaksanakan patroli 3 – 4 kali dengan sasaran lokasi – lokasi yang rawan konflik di 13 kab/kota Sulawesi Tengah.



Konsultasi publik Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (GRK)



Setelah berhasil menyumbang penurunan emisi sebanyak 15.747 ton CO₂ melalui konservasi hutan dan mangrove di periode tahun 2019 hingga 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya terhadap penurunan produksi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penyusunan dokumen Rencana Adaptasi Daerah (RAD-GRK).

Dalam sambutannya di kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Bappeda Sulteng Bersama KEMITRAAN, Sekretariat Provinsi, Novalina, M.M menyampaikan beberapa hal salah satunya capaian GRK yang masih jauh dari target. Oleh karenanya, beliau mendorong perlunya upaya lebih optimal dan berkelanjutan agar target tersebut dapat dicapai.

“Ke depan, dokumen ini tidak boleh hanya menjadi arsip, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata melalui kerja kolaboratif lintas sektor,” ujarnya.

Selain hutan, beliau juga menyebut perlunya mengoptimalkan sektor-sektor lain untuk mengoptimalkan capaian. “Selain hutan, ekosistem mangrove dan pesisir juga memiliki potensi

penyimpanan karbon terbesar. Potensi tersebut menjadi kekuatan penting harus dijaga dan dikembangkan dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca,” tambahnya.

Dokumen RAD-GRK telah melalui serangkaian proses, melibatkan berbagai instansi mulai dari Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta perwakilan dari masyarakat sipil baik dari Akademisi Universitas Tadulako, dan CSO yang semua tergabung dalam Anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dan juga media.

Edi Wicaksono Program Manager RBP GCF REDD+ KEMITRAAN berharap dokumen ini dapat menjadi acuan untuk memastikan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca di Sulawesi Tengah memiliki program dan target yang jelas, agar kontribusi pada target penurunan emisi di masa yang akan datang terukur.

Proses konsultasi publik dimulai dengan paparan materi tentang program GRK di Sulawesi Tengah

oleh Bappeda dan draft final dokumen RAD GRK oleh Akademisi Universitas Tadulako sebagai konsultan penyusun dokumen. Agar mendapat masukan substansi dokumen dan validasi data dari peserta kegiatan.

Terdapat beberapa masukan dari peserta konsultasi publik terhadap draf dokumen RAD-GRK, di antaranya berkaitan dengan penyesuaian program agar lebih realistis dan implementatif, penguatan dokumen dengan perencanaan daerah, serta perlunya mempertimbangkan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program.

Setelah mengakomodasi masukan dari konsultasi publik, dokumen RAD-GRK akan disahkan oleh Kepala Bappeda Sulawesi Tengah dan menjadi dokumen resmi yang akan dijadikan sebagai acuan program-program berkaitan dengan isu gas rumah kaca.





Pulihkan Lahan Kritis,
Provinsi Sulawesi Tengah Bagikan

*400 Ribu
Bibit Tanaman.*



Dalam rangka merehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) membagikan kurang lebih 400 ribu bibit tanaman kepada masyarakat.

Sebelum dibagikan, Pemerintah Provinsi terlebih dahulu melakukan bimbingan teknis seputar cara penanaman, perawatan, dan monitoring keberhasilan kepada warga. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok sehingga Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak hanya sesuai perencanaan, melainkan juga mampu memulihkan ekosistem hutan yang selama ini rusak akibat deforestasi dan aktivitas ilegal lainnya.

Total ada 183 peserta pelatihan, terdiri dari: 69 orang perwakilan dari 23 kelompok pelaksana rehabilitasi hutan rakyat, 54 orang perwakilan dari 18 kelompok PS, 60 orang perwakilan KTH non-PS dan komunitas sebagai peserta bimbingan teknis di seluruh zona.

Kegiatan dilaksanakan di empat zona pembagian kerja, yaitu zona 1 wilayah KPH Banawa Lalundu, KPH Kulawi, KPH Dolago Tanggunung dan Tahura. Zona 2 wilayah KPH Dampelas Tinombo, KPH Gunung Dako, dan KPH Pogogul. Zona 3 wilayah KPH Sivia Patuju, KPH Sintuvu Maroso, KPH Tepe Asa Aroa, dan KPH Tepe Asa Maroso. Zona 4 KPH Balantak, KPH Toili Baturube dan KPH Pulau Peling.

Anang Arif dari KPH Balantak menyampaikan

”Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok warga yang menjadi subjek penerima bibit dan sebagai garda terdepan dalam mendukung kegiatan RHL,” Ujarnya

“Khusus di wilayah KPH Balantak, saat ini terdapat lahan kritis seluas 4. 817 dalam kawasan hutan dan 2.137 di luar kawasan hutan. Melalui kegiatan RHL ini KPH Balantak berkomitmen untuk terus melaksanakan pengelolaan hutan lestari, produktif, dan berwawasan lingkungan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kiki rizki Amalia Project Officer PMU KEMITRAAN menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara bersamaan di masing-masing zona untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapat pengetahuan teknis tentang metode penanaman dan perawatan tanaman.



“Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kegiatan penting dalam proyek RBP GCF REDD+ untuk pemulihan lahan kritis di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terbagi dalam empat metode yaitu, rehabilitasi hutan rakyat, rehabilitasi dikawasan PS, rehabilitasi dikawasan non-PS serta penghijauan lingkungan. Dari total 400 ribu bibit, sekitar 171.497 batang bibit dibagikan untuk merestorasi hutan rakyat seluas 272 Ha, dan sebanyak 213.708 batang lainnya untuk merehabilitasi kawasan PS, non-PS dan penghijauan lingkungan.





Rahimah,

**Sang Perempuan
Penggerak Rehabilitasi
Hutan dan Lahan**

Rahimah, merupakan sosok dibalik suksesnya pembagian 12.045 bibit pohon untuk merehabilitasi 20 Ha hutan rakyat di Dusun Balombong, Desa Maleo Jaya, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Rahimah adalah anggota KTH Loinang Lestari, selain berkebun profesinya sehari-hari adalah pedagang pasar dan ibu rumah tangga. Sejak aktif mengikuti diskusi dan bimbingan teknis rehabilitasi yang dilakukan oleh KPH Toili Baturube dan terpilih menjadi penanggung jawab bibit di KTH Loinang Lestari, ia aktif menggerakkan anggotanya untuk merawat lima jenis bibit yang dibagikan oleh KPH Toili Baturube lewat Program RBP GCF REDD+, yaitu Jabon Merah, Durian Musangking, Alpukat Okulasi, Cokelat dan Jagung.

Setiap hari Ia mengajak anggota kelompok lainnya untuk merawat bibit tanaman yang ada dipersemaian sebelum dilakukan penanaman. Selain itu Rahima juga aktif membagikan metode penamaan dan perawatan tanaman, pengetahuan yang ia dapatkan saat mengikuti bimbingan teknis rehabilitasi.

Tidak hanya kepada anggota laki-laki, Rahima mengajak istri anggota kelompok agar ikut terlibat dalam perawatan tanaman. Inisiatif ini ia lakukan agar bibit terawat dengan baik kendati anggota KTH yang mayoritas laki-laki berhalangan karena ada urusan lain, sehingga dapat diganti oleh istri-istri mereka.

Karena menurut Rahima, kegiatan rehabilitasi ini penting dilakukan untuk memulihkan lahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi keluarga. “Program ini sangat membantu (buah-buahan yang dihasilkan bernilai ekonomi tinggi), maka harus dilaksanakan dengan baik, kita mendapatkan dukungan bibit yang ditanam dilahan sendiri dan mencegah banjir,” ujarnya.

Sela merawat bibit, Rahima juga terlibat dalam penyiapan lahan. Ia menginisiasi pendataan jumlah luasan lahan, serta jumlah dan jenis bibit yang akan diberikan kepada masing – masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan agar pembagian bibit dilakukan secara adil dan transparan, agar menghindari konflik antar sesama anggota kelompok.

“Pembagian bibit dilaksanakan berdasarkan jumlah luasan lahan yang dimiliki oleh masing – masing anggota kelompok dengan jumlah tanaman produktif 70% dan tanaman kayuan sebanyak 20%” ujarnya.

Dengan semangatnya, Rahima yang awalnya hanya bertanggungjawab untuk menjaga bibit turut serta memastikan proses rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya berjalan dengan melibatkan sekitar 30 anggota kelompok dengan kalkulasi masing-masing akan merehabilitasi sekitar 0,5 hingga 1 Ha lahan. Meskipun pohon-pohon yang dibagikan bernilai ekonomi tinggi, Rahima tidak tertarik untuk menikmatinya sendiri.



Kabar RBP SULAWESI TENGAH

